



Unit Penelitian dan Penerbitan  
Fakultas Ilmu Budaya,  
Universitas Gadjah Mada

**SASDAYA,**  
Gadjah Mada Journal of Humanities

ISSN: 2548-3218 (print); ISSN : 2549-3884 (online); website: <https://jurnal.ugm.ac.id/sasdayajournal/index>

- ✍ **Penataan Kota dan Masyarakat Perkotaan:  
Makassar sebagai Ibukota Negara Indonesia Timur (NIT) 1946-1950**  
Organize of the Cities and Urban Society: Makassar as the Capital of the East Indonesia State ( NIT) 1946-1950
- ✍ **Penulis/Author(s) : Ilham Daeng Makkelo**
- ✍ **Sumber/Source : SASDAYA, *Gadjah Mada Journal of Humanities*, Vol. 2, No. 1 (November 2017), pp. 315-333**
- ✍ **DOI:**
- ✍ **Penerbit : Unit Penelitian dan Publikasi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Indonesia**

**PENATAAN KOTA DAN MASYARAKAT PERKOTAAN:  
MAKASSAR SEBAGAI IBUKOTA NEGARA INDONESIA TIMUR (NIT)  
1946-1950**

**Ilham Daeng Makkelo<sup>1</sup>**

**ABSTRACT**

The main focus of this article was dynamics and transformation of Makassar when it became the capital of the State of East Indonesia (NIT), 1946-1950. The discussion is emphasized mainly on two main issues namely the arrangement of cities and community life. The first issue relates to the burden of providing infrastructure to support the role of the nation's capital. The development of facilities and infrastructure is a necessity that must be provided for smooth government at the central level. From this city, the NIT government apparatus, such as the President, ministry, and parliament, have offices and organize their activities. The second issue relates to the consequences of the arrival of people from outside Makassar to work in various institutions or organizations. Makassar is synonymous with a diverse population, concerning ethnicity, religion and profession. This working paper is more detail explain about infrastructure both in terms of administration and physical development of the city, as well as the dynamics of urban community life, especially in cultural activities. In the context of progress, they become the space of expression of modernity as the times change. The described reality explains that many different responses are occurring in each region of Indonesia in responding to the changing times. Especially in this period is better known as the revolution.

*Keywords: Kota Makassar, infrastruktur, kebudayaan, Negara Indonesia Timur (NIT)*

**PENGANTAR**

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, kota Makassar dan sebagian besar daerah di Indonesia bagian timur berada dalam suatu persimpangan. Secara hukum menjadi wilayah Republik Indonesia (RI), namun administrasi pemerintahan di tingkat bawah sama sekali belum berjalan. Hal tersebut terjadi karena Pemerintahan Sipil Hindia Belanda (*Netherlands Indies Civil Administration*) juga membentuk kembali suatu pemerintahan. Pada pihak lain, usaha masif dilakukan pihak Belanda untuk kembali berkuasa. Ketika Ratulangie diangkat

---

<sup>1</sup> Staf Pengajar pada Departemen Ilmu Sejarah, Universitas Hasanuddin, Makassar. Penulis mengucapkan terima kasih atas nasehat akademik dan kontribusi perspektif dari Prof. Dr. Bambang Purwanto, M.A., dan Dr. Sri Margana, M.Phil untuk artikel ini. Email: ilhamdaengmakkelo@gmail.com.

sebagai Gubernur dan ditugaskan untuk menegakkan RI di Sulawesi, H. J. Van Mook dengan cekatan memobilisir terbentuknya sebuah negara tersendiri, sebagai usaha melestarikan ikatan kolonial lama dalam bentuk baru.<sup>2</sup> Usaha pihak Belanda berhasil menghimpun dan meyakinkan pemimpin lokal di Indonesia bagian timur sehingga berhasil dideklarasikan Negara Indonesia Timur (NIT) tahun 1946.<sup>3</sup>

Kota Makassar menyandang status tertinggi saat ditetapkan sebagai ibukota NIT. Sebuah ibukota negara yang mendasarkan birokrasi pemerintahan di satu sisi pada kelompok penguasa tradisional 'lama'.<sup>4</sup> Di sisi lain, perangkatnya diisi oleh orang-orang 'baru' yang memperoleh kedudukan terutama karena pendidikan. Pihak Belanda sendiri, menegaskan bahwa pemerintahan NIT harus dikelola secara modern. Peran sebagai ibukota negara setidaknya meneruskan karakter kota ini yang kosmopolitan dan multi-etnis. Berdatangan orang-orang dari luar daerah, khususnya dari daerah timur Indonesia. Sebagian besar datang guna bekerja dalam sistem birokrasi dan pemerintahan NIT.<sup>5</sup> Namun pekerjaan terbesar rezim ini adalah menyusun dan mengelola birokrasi negara, melaksanakan pembangunan, dan juga memajukan kehidupan masyarakat.

## DILEMA NIT: ANTARA CITA-CITA DAN REALITAS

NIT adalah sebuah negara berdaulat yang menginginkan terbentuknya negara federal dalam bentuk Negara Indonesia Serikat yang meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda.<sup>6</sup> Secara administratif merupakan "kelanjutan" dari sistem

<sup>2</sup> Ratulangie diangkat sebagai Gubernur Sulawesi pada 18 Agustus 1945 dan dikirim ke Makassar, namun tidak pernah benar-benar bisa menjalankan mandat yang diberikan Jakarta kepadanya. Ratulangie dengan beberapa tokoh republik, diantaranya Lanto Daeng Pasewang ditangkap pada bulan Oktober 1945, dan pada bulan Juli 1946 di buang ke Serui Papua.

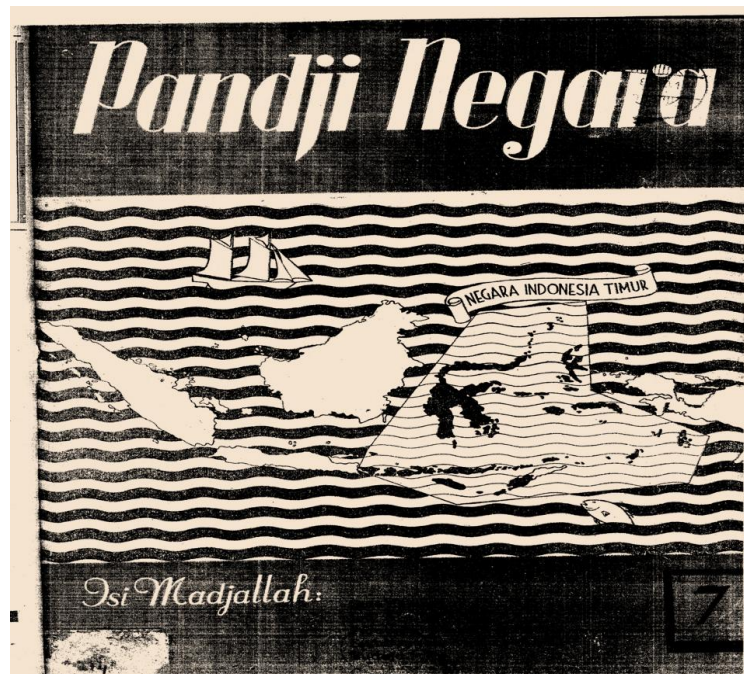
<sup>3</sup> Untuk membentuk pemerintahan NIT, di Sulawesi Selatan, Belanda melancarkan kampanye pasifikasi dari bulan Desember 1946 sampai Maret 1947 yang mengakhiri perlawanan bersenjata. Perlawanan tersebut dilanggengkan bahkan dimitoskan dalam perlawanan heroik "korban 40.000 jiwa". Lihat Barbara S. Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakkar. Dari Tradisi ke DI/TII*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), hlm. 125.

<sup>4</sup> Di tingkat lokal, para "raja-raja" di Sulawesi Selatan kedudukan mereka diformalkan dengan dibentuknya Dewan Hadat Tinggi pada bulan Januari 1947. Terdiri atas 31 daerah kerajaan (swapraja) di Residensi Sulawesi Selatan, baik dari swapraja lama dan yang merupakan swapraja baru (*neo landschappen*). Lihat Stbld 1947, No. 9 dan 10; lihat juga J. R. Chaniago, "Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia: Peranan Pemimpin Lokal dalam Dinamika Politik di Sulawesi Selatan dan Sumatera Timur 1950" (Disertasi Universitas Gadjah Mada, 2002), hlm. 64.

<sup>5</sup> Selain itu ada anggota parlemen NIT beranggotakan 80 orang utusan 13 daerah di kawasan timur Indonesia dan beberapa orang dari golongan fungsional, termasuk juga para wartawan dari negeri Belanda dan negara-negara lain. lebih lanjut lihat J. R. Chaniago, *ibid.*, hlm. 242; Burhaman Djunedding, "Pesta Demokrasi di Daerah Bergolak: Pemilu Tingkat Lokal dan Pemilihan Umum 1955 di Sulawesi Selatan". (Yogyakarta: Tesis Jurusan Sejarah FIB-UGM, 2010), hlm. 55.

<sup>6</sup> Dalam suatu amanatnya pada tahun 1947, Perdana Menteri NIT, Nadjamoeddin Daeng Malewa menegaskan bahwa Negara Indonesia Timur adalah "Grondwettelijke Staat" suatu negara yang berdasar undang-undang dasar, negara berdaulat yang *souverein*. Tetapi dengan sukarela

pemerintahan Belanda. Segala bentuk kekuasaan dan badan-badan pusat pemerintahan Hindia Belanda diserahkan kepada Negara Indonesia Timur. Semua pegawai pemerintahan, residen, asisten residen, kontrolir, mantri polisi, serta seluruh pegawai tata usaha pemerintah, dan lain-lain dipekerjakan dan dianggap sebagai pegawai NIT.<sup>7</sup> Dalam keseharian masyarakat, gambaran dan simbol yang muncul tetap menampilkan keadaan seperti sebelum perang. Instrumen ekonomi seperti *Postpaarbank* juga masih berperan dalam mengatur arus keuangan.<sup>8</sup>



**Gambar 1.** Wilayah NIT yang dijadikan sampul Majalah Pandji Negara

Sebagai sebuah institusi negara berdaulat, pijakan NIT tidak lah kokoh dalam hampir segala aspek. Penyokong terbesar, Belanda tidak lagi memiliki kekuasaan yang kuat dan dominan seperti masa-masa sebelumnya. Di tingkat elit negara ini,

membatasi kedaulatannya untuk diserahkan pada Negara Indonesia Serikat yang akan dibentuk selambatnya di dalam tempo dua tahun. NIT bukan daerah otonom dalam arti hukum negara, tetapi suatu negara yang mempunyai hak kedaulatan atas soal-soal yang menjadi haknya yang tidak diserahkan pada Negara Serikat Indonesia, dan oleh karena itu mempunyai hak sepenuhnya atas soal itu yang tak dapat diubah kecuali oleh parlemen NIT sendiri. Hal ini sejalan dengan butir-butir hasil Perjanjian Linggardjati, yang menyebut NIT sebagai negara merdeka dan sama kedudukannya dengan Negara Republik Indonesia, namun bercita-cita bersatu dalam Negara Indonesia Serikat. Lihat *Negara Baroe*, 21 Maret 1947, hlm.1; 16 April 1947, hlm.2.

<sup>7</sup> *Besluit* PJM Let. Gubernoer Djenderal 14 Maret 1947, No.5, dan *Besluit* Wakil Direktur Binnenland Bestuur 14 Maret 1947, No.43-47; Lihat *Negara Baroe*, 31 Maret 1947, hlm.1.

<sup>8</sup> *Postparbank Agentschap* Makassar berdiri tahun 1928 dan berhenti pada masa Jepang. Dibuka kembali pada Mei 1946. Laporan pada Mei 1949, menyebutkan bahwa mengurus administrasi 38.195 penabung dengan simpanan f. 8.988.251, dengan 120 kantor penyelenggara. Lihat *Pandji Negara*, No.6, Juli 1949.

banyak –kalau tidak bisa dikatakan sebagian besar– tidak sejalan dengan cita-cita negara bentukan ini. Sebaliknya justru mereka memimpikan penyatuan dengan negara Republik Indonesia, baik yang diekspresikan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Hal ini juga tercermin ketika berlangsung konferensi wartawan yang diprakarsai Kementerian Penerangan pada Oktober 1947 di gedung parlemen NIT. Dalam konferensi ini diterangkan bahwa pers yang beraliran ke Indonesia Timoer hanya sekitar 30%, sedang pers yang condong ke Republik 70%.<sup>9</sup>

Kondisi itu pula yang menyebabkan sikap ‘akomodatif’ negara atas berbagai kepentingan, baik dari pihak Belanda maupun pihak Republik. Simbol kedua pihak dirayakan secara bersamaan, dan perbauran keduanya adalah yang terbersit sebagai identitas negara ini. Dalam peristiwa kenegaraan maupun dalam aktivitas masyarakat, sikap dualisme itu nyata terlihat. Tiap perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus, dilakukan sangat meriah.<sup>10</sup> Hal sama terjadi saat perayaan hari-hari besar Kerajaan Belanda, misalnya perayaan ulang tahun ratu, kelahiran putra-putri mahkota, dan lain-lain.<sup>11</sup>



**Gambar 2.** Kemeriahn Perayaan Proklamasi Kemerdekaan RI di Kota Makassar pada masa NIT

<sup>9</sup> *Negara Baroe*, 7 Oktober 1947, hlm. 2.

<sup>10</sup> Pada perayaan 17 Agustus tahun 1949, di Lapangan Karebosi berlangsung arak-arakan sebanyak 70.000 orang, sedangkan di beberapa tempat lain termasuk di gedung bioskop juga dilangsungkan upacara peringatan. Lihat *Pandji Negara*, No.9, Agustus 1949, hlm.11.

<sup>11</sup> Menyambut kelahiran Putri Oranje pada tahun 1947, maka diadakan perayaan besar-besaran di ibukota NIT. Selain parade dan tembakan kehormatan, juga dilaksanakan acara resmi dan pesta rakyat. Di beberapa tempat dipasang pembesar suara untuk mengabarkan kelahiran ini, dan Radio Makassar menyambutnya dengan memutar musik gembira dari jam 8 pagi sampai jam 22.30 malam. Sedangkan bioskop mengadakan pemutaran film secara gratis. Lihat *Negara Baroe*, 7 Februari 1947, hlm.2; 8 Februari 1947.



Sistem kekuasaan dan administrasi NIT adalah hasil negosiasi, tawar-menawar, akomodasi, dan kompromi. Hal itu memberi kedudukan untuk para pemimpin lokal yang tersebar di Indonesia Timur. Anggota parlemen ketika pertama kali dibentuk beranggotakan para raja-raja lokal yang memiliki kekuasaan tradisional secara turun temurun. Selain itu di tingkat lokal dibentuk dewan adat, misalnya Hadat Tinggi Dewan Selebes Selatan yang dilantik pada 12 November 1948.<sup>12</sup>

Sebagai sebuah negara, kedudukan ibukota negara adalah perhatian utama. Bahkan dalam suatu sidang parlemen NIT, ibukota Makassar diusulkan menjadi daerah istimewa, daerah ke-14 NIT.<sup>13</sup> "Modernisasi" administrasi pemerintah maupun dalam kehidupan kemasyarakatan ditandai kegiatan 'pemilihan', dengan semboyan 'dari rakjat dan untuk kepentingan rakjat'.<sup>14</sup> Pada 8 Agustus 1947 diadakan pemilihan anggota Dewan *Haminte* Makassar untuk masa jabatan 1947-1951.<sup>15</sup> Pemilihan ini diikuti oleh calon dari beberapa koalisi, seperti "Barisan Tenaga Rakjat" (Partai Tenaga Rakjat, Partai Rakjat Indonesia, Sarekat Boeroeh Soepir, Persatoean Polisi, Poesat Pedagang Indonesia, Persatoean Nelajan Indonesia dan M.O.S.). Selain koalisi tersebut, pemilihan ini juga diikuti oleh calon dari "Persatoean Sekerdja Indonesia", dan "Barisan Kebangsaan".<sup>16</sup> Pelantikan Dewan *Haminte* Makassar ini berlangsung pada Oktober 1947.<sup>17</sup>

## PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR NIT DAN IBUKOTA NEGARA

Untuk mensejajarkan posisi dengan negara Republik Indonesia maka sejak terbentuknya birokrasi NIT, slogan "pembangunan" dikampanyekan untuk rencana

<sup>12</sup> Pembentukan Hadat Tinggi dimulai pada zaman Residen Dr. C. Lion Cachet, yang ditujukan supaya para raja-raja dapat memberikan bantuannya untuk kepentingan negara, terutama terhadap usaha mengembalikan keamanan dan perdamaian dengan jalan yang tidak bersifat kekerasan. Ketua Hadat Tinggi ini adalah Aroempone (Raja Bone) dan wakilnya adalah Raja Gowa. Lihat *Indonesia Timoer*, 13 November 1948, hlm.4.

<sup>13</sup> *Indonesia Timoer*, 8 Desember 1948, hlm.2.

<sup>14</sup> Selain pemilihan anggota Dewan *Haminte*, berlangsung pula pemilihan *khadi*, pemilihan kepala kampung, dan lain-lain. Lihat *Indonesia Timoer*, 29 Mei 1948, hlm.3; 29 Mei 1948; *Negara Baroe*, 7 Agustus 1947, hlm.2.

<sup>15</sup> Pada pemilihan anggota Dewan *Haminte* Makassar tahun 1947, keanggotaannya terdiri atas 3 kategori; 5 orang kalangan bangsa Belanda; kalangan asing bukan bangsa Belanda sebanyak 4 kursi; dan pemilihan untuk golongan bangsa Indonesia sebanyak 12 kursi. Lihat *Negara Baroe*, 1 Agustus 1947, hlm.2.

<sup>16</sup> *Negara Baroe*, 14 Juli 1947, hlm.2; 19 Juli 1947, hlm.2; 9 Agustus 1947, hlm.2.

<sup>17</sup> Anggota Dewan *Haminte* yang dilantik: Mr. Leepel, Han Boen Tjeng, Achmad Sagaf, Simatoepang, Thoeng Tiong Piet, Liem Tjieng Goan, Gann Toan Lieng, Mr. Liesker, Ir. Lels, I. Naim, J. C. C. van Wijk, Donggeng dg Ngasa, Andi Mannapiang, Nj. Salawati Daoed, Nj. Towolioe, Abdoelwaris, Sjamsoeddin Dg. Mangawing, A. Latoeperissa, A. Mattonrokang, Sjadly, Dr. Dirksen. Lihat *Negara Baroe*, 15 Oktober 1947, hlm.2.

rekonstruksi akibat ‘kehancuran’ masa perang.<sup>18</sup> Meski demikian antara tahun 1946-1947 tidak banyak pekerjaan akibat kekurangan alat dan bahan bangunan, pegawai serta pekerja. Namun untuk tujuan pemugaran, pada tahun 1946 telah dibentuk ‘Djawatan Pembangunan se-Daerah’ (P.O.D.) di Makassar, Manado, Ambon, dan Kupang. Djawatan ini kemudian berganti menjadi Kementerian Lalu Lintas dan Pengairan. Pekerjaan utamanya adalah pembangunan fisik, seperti perkantoran, sekolah, penjara, perumahan, jalan, saluran pipa air, dan lain-lain. Di ibukota Makassar, perhatian awal terutama pada infrastruktur pelabuhan untuk mendukung aktivitas barang dan penumpang.<sup>19</sup> Selanjutnya fasilitas pemerintahan, dan kebutuhan besar akan perumahan akibat pertambahan penduduk yang cepat.<sup>20</sup>

Perhatian pemerintah NIT juga terlihat pada berbagai aspek. Dalam bidang pendidikan, sejak tahun 1947 diberlakukan rancangan pengajaran baru dan dibarengi dengan konferensi membicarakan politik pengajaran. Upaya tersebut dibarengi dengan ‘Pemberantasan Buta Huruf’ (PBH) tahun 1948 dengan biaya f. 610.000 guna keperluan kursus-kursus, tunjangan guru dan peralatan sekolah. Di tingkat perguruan tinggi, pada 8 Oktober 1948 secara resmi dibuka Fakultas Ilmu Ekonomi meriwa mahasiswa sejak 15 Januari 1948.<sup>21</sup> Untuk sarana kesehatan, dilakukan perluasan Rumah Sakit Kusta di Djongaja menjadi Rumah Sakit Negara. Sedangkan Kementerian Perekonomian secara intens mendorong produktivitas baik

<sup>18</sup> Masa perang yang dimaksud dimulai saat pendudukan Jepang, kekacauan akibat kekalahan Jepang dan datangnya tentara sekutu yang diboncengi tentara Belanda. Ada dua versi tentang “kehancuran” akibat pemboman Jepang. Sumber atau catatan orang Belanda menggambarkan kehancuran ‘total’ seluruh bagian kota, seperti yang digambarkan oleh amtenaar Belanda H. J. Koerts. Lihat H. J. Koerts, “Amtenar BB di Sulawesi Selatan”, dalam S. L. Van der Wal (peny.) *Kenang-Kenangan Pangrehpraja Belanda 1920-1942* (Jakarta: Djambatan, 2001). Sedangkan dari berita media cetak di awal masa NIT, menyebutkan bahwa kerusakan yang paling berarti hanya di perkampungan Tionghoa serta daerah pelabuhan.

<sup>19</sup> Pelabuhan adalah infrastruktur terpenting ibukota negara ini, karena menjadi pintu utama mobilitas penduduk dan barang. Pelabuhan dibangun dengan teknologi modern, mengganti prasarana alat bongkar muat yang sebelumnya mengandalkan tenaga manusia. Pada 1949 dipergunakan alat ‘fork lift, tructractor, finger lift, copra blower’, dan lain-lain. Salah satu penggerak utama aktivitas pelabuhan adalah Maskapai Kapal Selebes Selatan (MKSS), yang selain mengangkut masuk dan keluar barang, juga menghubungkan dengan pesisir dan pelabuhan di pulau Sulawesi. Perusahaan ini dimiliki bangsa Indonesia (55%) dan Eropa (45%). Lihat *Pandji Negara*, No.6, Juli 1949, hlm.14.

<sup>20</sup> *Pandji Negara*, No.5, Juni 1949, hlm. 3-4.

<sup>21</sup> Pada tahun 1948, jumlah peserta PBH 299.683; lulus 28.000, guru 4.600, kursus 4.600. Tahun 1949, murid yang lulus 56.496 dan guru 5.734. Untuk Fakultas Ekonomi ditempatkan di Rumah Baraja bekas milik Major Tionghoa. Ide pendirian beberapa Fakultas di beberapa tempat dengan anggapan adanya suatu universitas pusat, federal di Jakarta. Sedangkan fakultetnya tersebar di seluruh Indonesia. Tahun 1949 mahasiswanya 59 orang; 32 orang Indonesia, 18 Tionghoa, 7 Belanda peranakan, 1 Belanda, 1 campuran India Indonesia. Dari 32 mahasiswa Indonesia, 18 dari berbagai etnis di NIT, selebihnya dari Jawa, Madura dan Sumatera. Lihat *Pandji Negara*, No.6, Juli 1949, hlm. 13; No.8, Agustus 1949, hlm.4; No.9, Agustus 1949, hlm.4; *Indonesia Timoer*, 9 Oktober 1948, hlm.2.

pedagang berbangsa Indonesia maupun Tionghoa. Untuk kebutuhan perumahan dalam NIT ditangani oleh 'Poesat Dewan Peroemahan' berpusat di Makassar dengan Dewan Perumahan di daerah di bawah pengawasan Residen.<sup>22</sup>

Hingga triwulan ketiga tahun 1949, perkembangan ekonomi di Negara Indonesia Timur memperlihatkan kemajuan. Di Sulawesi Selatan dimulai penyelenggaraan pembangunan irigasi Bila, pendirian sarana penggilingan padi, pendirian pabrik tapioka di Sinjai, pengembangan industri tekstiel di Makassar, pendirian pabrik minyak, industri tembikar, dan lain-lain.<sup>23</sup>

Salah satu perhatian utama NIT adalah pengembangan ibukota Makassar. Berdasar rencana perluasan kota oleh Dewan Perantjang dan Walikota pada Agustus 1947, ditetapkan bahwa kota Makassar didirikan sepanjang punggung pantai antara muara sungai Djeneberang di selatan dan Djene Tallo di timur laut. Sedangkan lebarnya sampai di *S. S. weg* (Jalan Veteran). Acuan dalam rencana kota adalah 'Stedebouw' yang pernah berlaku pada masa Belanda. Meliputi segala aspek pembangunan, terutama pembuatan jalan, saluran air, pembangunan rumah, toko, dan kantor. Sasarannya adalah tercipta keserasian dalam kota, dengan memperhatikan kepentingan untuk tempat tinggal, bekerja, bermain olahraga, jalanan, dan sebagainya.<sup>24</sup>

Pembangunan perumahan adalah salah satu tantangan utama ibukota Makassar sebagai akibat kekurangan rumah. Beberapa tempat mengalami kehancuran saat perang, dan yang terparah yaitu kerusakan perkampungan. Selain itu penduduk kota pasca perang mengalami pertambahan yang besar. Rumah sementara yang didirikan jauh dari cukup, begitupun kamar hotel juga penuh. Di sisi yang lain, banyak rumah tinggal pada saat sebelum perang kemudian berubah fungsi menjadi kantor, toko, gudang, restoran atau bar.<sup>25</sup>

Pihak paling menderita dengan kekurangan rumah yakni orang-orang kurang mampu. Di kampung bekas tempat pengungsian, tampak ratusan keluarga tinggal di rumah pondokan. Namun permasalahannya, siapakah yang berhak mendapatkan prioritas dari rumah *Haminte* yang terbatas. Hal ini mengemuka karena pembangunan perumahan seolah hanya diperuntukkan kepada para *amtenar* negara dan *Haminte* saja. Bahkan para partikulier yang mempunyai kedudukan penting dalam masyarakat dan pembangunan negara juga sulit mendapatkan rumah dari *Haminte*.<sup>26</sup>

Pada tahap awal, ketika pemerintah kota belum mampu membangun perumahan, 'Bagian Pengawas Bangoenan dan Peroemahan *Haminte* Makassar', hanya menyediakan contoh gambar rumah, baik yang dari batu atau bambu, beratap

<sup>22</sup> *Indonesia Timoer*, 13 Februari 1948, hlm.2; 13 Mei 1948, hlm.1; 24 November 1948, hlm.2.

<sup>23</sup> *Pandji Negara*, No.21, Desember 1949, hlm.15.

<sup>24</sup> Hal yang diperhatikan dalam rencana kota itu; 1) *Zonering*, kepastian atas penggunaan bagian dari kota, misalnya khusus untuk pembangunan gedung, pembangunan toko, daerah untuk jalan, taman. Pembagian ini disebut *bouwkringen*. 2) Undang-undang (*voorschriften*) untuk pembikinan jalan dan rumah. Lihat *Locale Techniek*, 1940, No.1, hlm.16-20.

<sup>25</sup> *Negara Baroe*, 6 Februari 1947; 30 Oktober 1947.

<sup>26</sup> *Indonesia Timoer*, 5 Maret 1948, hlm.1.



dengan genteng atau nipa. Pengaturan itu dibarengi dengan kontrol pemerintah bahwa pendirian rumah harus mendapat izin walikota. Hal ini dilakukan karena pemerintah *Haminte* telah menyusun rancangan kota yang mengatur wilayah perumahan, perkampungan, dan kegiatan usaha. Untuk pendirian rumah bahkan telah dibuat aturan yang cukup detail.<sup>27</sup> Rumah atau bangunan, termasuk yang tidak terawat sejak perang diwajibkan untuk 'dikapuri' (dicat) pada bulan Mei setiap tahun.<sup>28</sup>

Untuk mempercepat pendirian perumahan, pihak *Haminte* memberi kesempatan kepada penduduk kota untuk memperoleh bantuan/pinjaman uang untuk mendirikan rumah. Jika direkomendasikan, maka pelaksanaan teknisnya akan berhubungan dengan "Jajasan Pembangoenan kembali Indonesia Timoer" (*Stichting Wederopbouw Oost-Indonesie*).<sup>29</sup> Sedang pendirian perkampungan rakyat sudah direncanakan pula dan dimulai di *Samboengdjawaweg*. Perumahan atau model kampung di *Samboengdjawa* akan didirikan 250 buah rumah kampung yang akan dibuat sederhana, dengan lantai beton, dinding setengah batu dan beratap nipa. Dilengkapi dengan kakus umum serta tempat mandi umum serta air minum.<sup>30</sup> Pada tahun 1948, tuntutan perumahan juga disuarakan oleh buruh. *Plaatselijke Loon-Commissie* di Makassar yang diketuai oleh Ass. Residen Beudeker mengirim surat kepada Residen Sulawesi Selatan supaya mendirikan kampung bagi pekerja. Suatu kampung yang dilengkapi fasilitas seperti toko, bioskop atau *toneel* dan masjid. Untuk pembangunannya, pemerintah dapat meminjamkan tanah yang murah, serta alat transportasi untuk mengangkut bahan perumahan (bambu, atap, kayu, dan lain-lain).<sup>31</sup>

Pekerjaan infrastruktur lain adalah jalan yang dalam rancangan terdiri atas jalan besar (utama) untuk hubungan interlokaal (luar kota) dan *interwijk* (luar kampung atau *wek*) yang dibagi dalam *primair* (terpenting) dan *secundair* (penting).

---

<sup>27</sup> Rumah yang didirikan memiliki jarak yang ditentukan dari jalanan, sebagai garis sempadan. Pemeriksaan juga dilakukan dalam pembangunan rumah. Untuk rumah batu, dilakukan pemeriksaan mulai dari pembangunan dasarnya, saat pemasangan rangka atap, dan ketika telah rampung. Pada bangunan dari kayu atau bambu, cukup diperiksa dua kali, yaitu pada waktu dimulai dan selesai. Lihat *Indonesia Timoer*, 18 September 1948, hlm.4.

<sup>28</sup> Pengapuran atau pemberian cat tidak saja rumah atau bangunan tetapi juga pagar. Pada tahun 1948, pemerintah kota bahkan memberikan sanksi bagi yang melanggar yaitu denda setinggi-tingginya f.100,- atau hukuman penjara setinggi-tingginya 1 bulan. Lihat *Indonesia Timoer*, 22 September 1948, hlm.2.

<sup>29</sup> Untuk rumah yang luasnya tidak lebih dari 180 m<sup>2</sup> akan mendapatkan tunjangan atau pinjaman. Rumah kecil dengan luas 50 m<sup>2</sup> diberikan bantuan setinggi-tingginya 75% dari total biaya pembangunan. Tunjangan ini diberikan hanya jika pembangunan rumah itu telah rampung. Lihat *Indonesia Timoer*, 25 September 1948, hlm.2.

<sup>30</sup> Fasilitas mandi, cuci, kakus umum, dan pengambilan air ini tidak hanya didirikan di tengah-tengah pemukiman, tetapi juga di tempat-tempat keramaian, seperti antara *Strandboulevard* dan *Strandweg* di Kampoeng Baroe, dan juga di sekitar pasar. Lihat *Indonesia Timoer*, 24 Agustus 1948, hlm.4.

<sup>31</sup> *Indonesia Timoer*, 12 Februari 1948, hlm.1.

Selanjutnya jalan pendukung yang terhubung dengan jalan besar tadi, guna menghubungkan setiap bagian kota (kelompok rumah). Salah satu pekerjaan penting adalah pembuatan jalan 'Strandboulevard' mulai dari *Stalstraat* (pasar ikan Kampoeng Baroe) sampai *Strandweg* (rumah sakit Stella Maris), yang diresmikan pada 23 Agustus 1948. Berlangsung pula perbaikan dan pengaspalan jalan (gang) yang terdapat di *S. S. weg*, dan di *Kemahweg*. Termasuk pembangunan jalan dalam kampung-kampung dilengkapi dengan selokan yang dibeton.<sup>32</sup>

Namun permasalahan terbesar soal jalan yang menjadi keresahan warga kota adalah kesemrawutan. Parkir yang tidak beraturan di setiap sudut kota. Jualan sayur, ikan, kain di sepanjang jalan raya seperti di *Pakareppestraat*, *Tempelstraat*, *Muurstraat* dan *Zandzeestraat*. Beberapa jalan dan ujung gang penuh sampah disertai bau busuk. Debu juga berhamburan sepanjang hari terutama di pusat-pusat perdagangan akibat jalan yang rusak. Sedangkan perapatan (perempatan) yang ramai oleh kendaraan tidak ada pengaturan. Seperti di perapatan *Tempelstraat-Muurstraat*, *Muurstraat-Van Schelleweg*, *Tempelstraat-Matjiniajoweg*, *Tempelstraat-Bandastraat*, *Matjiniajoweg-Van Schelleweg*, *Van Schelleweg-Hoogepas*, *Patoenoeang-Mardekajaweg-Bontoalaweg* dan *Hospitaalweg-Hoogepad*.<sup>33</sup>

Pada pihak lain, hal mencolok yang kurang mendapatkan perhatian adalah pasar-pasar. Pasar Kampoeng Baroe yang terletak di tengah kota penuh dengan tumpukan sampah. Pasar ini menjadi tempat membuang kotoran dengan bau yang sangat menyengat. Hal itu terjadi karena pasar tersebut menjadi tempat tinggal banyak kepala keluarga yang tidak memiliki rumah. Kondisinya selalu berlumpur sepanjang tahun dan tidak terpelihara, menyebabkan beberapa pihak mengusulkan pemerintah kota untuk menghapus pasar tersebut.<sup>34</sup> Pekerjaan prasarana pasar hanya pada pembangunan *Pasar Kalimboe* yang terletak di *S. S. weg* dan *Marosweg*. Pasar ini akan menjadi pasar klas satu di *Haminte* Makassar, karena dibangun secara modern dengan biaya f. 80.000. Setelah renovasi maka letak pasar tidak lagi berada di sebelah kiri dan kanan *Marosweg*, tetapi hanya di sebelah selatan (Bontoala), supaya pengunjung tidak perlu hilir mudik melewati *Marosweg*.

Infrastruktur menyangkut pendidikan, kesehatan, dan sarana sosial juga mulai dikerjakan. Beberapa sekolah diperbaiki seperti sekolah di *Mesmanlaan*, Baraja, *Oude-Telloweg* dan di *Wadjoweg*. Pendiriannya dilakukan serba modern, dengan ruang kelas dibuat sedemikian rupa sehingga udara di dalam sekolah segar dan terang, serta dilengkapi dengan toilet dan air. Menurut pemerintah *Haminte*, jumlah kelas sekolah tahun 1948 ada 146 dan jumlah murid 6.335, sedang gurunya hanya 101 orang. Di antara sekolah, ada yang harus dipergunakan pagi dan sore, sebab banyaknya murid melebihi kemampuan ruang sekolah dan tenaga pengajar. Sedang fasilitas kesehatan, selain perbaikan rumah sakit, didirikan pula poliklinik *Haminte* yang dikepalai oleh seorang dokter, seperti di *Patoenoeang* yang dikepalai oleh dr. Grootings. Poliklinik juga melayani ibu hamil, sakit gigi, dan yang kurang mampu dapat berobat gratis. Poliklinik yang terletak di *Roembiaweg-Diponegoroweg* sudah

<sup>32</sup> *Negara Baroe*, 12 April 1947.

<sup>33</sup> *Indonesia Timoer*, 23 September 1948, hlm.3.

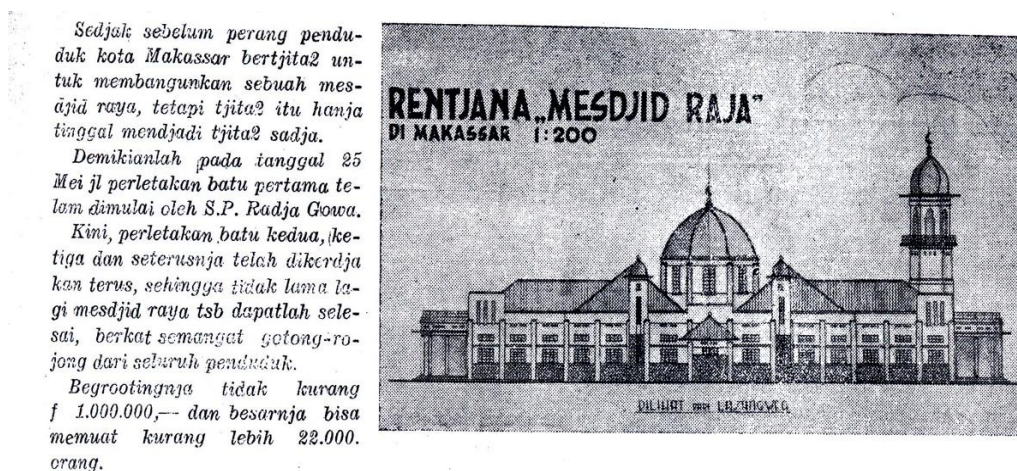
<sup>34</sup> *Indonesia Timoer*, 1 November 1948, hlm.1; 2 Desember 1948, hlm.3.

memiliki juru rawat yang tinggal di dalam. Untuk sarana keagamaan, ditandai dengan pembangunan masjid raya dengan peletakan batu pertama pada 25 Mei 1949, yang dihadiri Presiden NIT, Wali wakil tinggi mahkota, Arumpone, Raja Gowa, Sultan Sumbawa, Menteri Djustisi, Perekonomian, Kesehatan, Menteri negara dan penerangan, anggota parlemen dan lainnya. Masjid ini akan menjadi pusat kaum muslimin dan menghilangkan pertikaian paham, sekaligus lambang kemegahan kota.



*S. P. Radja Gowa sedang meletakkan batu pertama. Kita harap tidak sadja hingga batu pertama. Kedua, ketiga dan seterusnya sangat dipentungkan.*

**Gambar 3.** Peletakan batu pertama pembangunan Mesjid Raya Makassar tahun 1947



**Gambar 3.** Denah rencana pembangunan Mesjid Raya Makassar, 1947

Usaha pemerintah kota dalam pembangunan dan memperbaiki kota tetap dilakukan. Meskipun masih sangat jauh dari memuaskan, akan tetapi beberapa pekerjaan sudah boleh dibanggakan. Untuk mendapatkan ide perbaikan kota, maka pada 1948, Walikota Abdoel Hamid Daeng Magassing, berkunjung ke beberapa kota di Belanda. Sebagai hasil kunjungan itu, disimpulkan perlunya otonomi penuh kekuasaan walikota, selain kampanye untuk membangun kesadaran akan kebersihan

warga kota yang dibarengi dengan aturan-aturan yang ketat.<sup>35</sup> Salah satu kendala yang dihadapi adalah kekurangan finansial, sehingga menaikkan berbagai pajak selalu menjadi pilihan. Tahun 1948, dinaikkan pajak tontonan, pajak sampah dan perumahan, pajak rumah kopi dan minuman keras, pajak penjagalan, pajak sepeda, kendaraan, dan lain-lain. Sumber lainnya adalah ide penjualan tanah di bawah penguasaan pemerintah kota, misalnya di Jalan Goa kepada *British-American Tobacco* (BAT), meski mendapat penentangan dari beberapa pihak dalam Dewan Kota.<sup>36</sup>

## MASYARAKAT YANG BERUBAH DAN KEHIDUPAN KEBUDAYAAN

Negara merdeka, simbol-simbol Belanda, ibukota negara, kekuasaan tradisional, dan impian-impian modernitas adalah kenyataan yang berperan dalam mempengaruhi masyarakat yang berubah setelah terbentuknya NIT. Ekspresi yang muncul tidak saja karena dorongan kondisi yang ada namun juga tidak terlepas pada referensi zaman sebelumnya dan juga kebutuhan dan harapan-harapan yang dijanjikan masa selanjutnya.

Antusiasme masyarakat dimulai ketika penyambutan pertama kali Presiden NIT ketika sampai di ibukota Makassar pada bulan Maret 1947.<sup>37</sup> Dalam penyambutan ini, simbol Belanda dan Republik disandingkan, seperti ketika lagu kebangsaan Belanda "Wilhelmus" dan lagu kebangsaan "Indonesia Raya" yang diperdengarkan oleh grup musik Tionghoa.<sup>38</sup> Masa-masa setelah peristiwa ini memperlihatkan aktivitas masyarakat terlihat jauh lebih leluasa dibanding masa sebelumnya, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan kehidupan kebudayaan.

Tumbuhnya berbagai "perkumpulan" menandai geliat masyarakat perkotaan. Di antara yang aktif adalah Persatoean Goeroe, Serikat Wanita di Indonesia Timoer, Taman Pembatjaan "Gatera", Persatuan Nelajan Indonesia<sup>39</sup>, Persatoean Waroeng Indonesia. Di beberapa distrik dibuka Balai "Pusat Pertemuan Pemuda", yang didukung Departement Oeroesan Sosial. Di tempat ini tersedia perabot rumah tangga, pesawat radio, surat kabar, majalah, lapangan ping pong, badminton, catur,

<sup>35</sup> *Indonesia Timoer*, 16 Oktober 1948, hlm.3.

<sup>36</sup> *Indonesia Timoer*, 5 Maret 1948, hlm.2; 10 Mei 1948, hlm.2.

<sup>37</sup> Arak-arakan penyambutan dimulai dari Koningsplein, dan berjalan dari *Hospitaalweg* menuju istana, yang diikuti peserta dari Sekolah Rendah Indonesia, Sekolah Tionghoa, Sekolah Rendah Eropa, Sekolah Menengah Indonesia, MULO, HBS-AMS, Kepandoean, Gabungan Peladjar Maloekoe, Persatuan Wanita Penolong Sosial, Patoendan Toradja, warga kota yang dikawal barisan berkuda dari Gowa. Sebagai rangkaian kegiatan, diadakan juga pertandingan sepakraga oleh M.O.S lawan V.I.O.S. Pada malam harinya, di ruangan istana diadakan tari-tarian; Padjoge Oelaweng dari Bone, Pakarena BorongloE dari Gowa, Wajang Djawa, Menari Ambon, Maingket dari Minahasa, Mas Opera dari Banjarmasin, serta pencak dan koentao. Lihat *Negara Baroe*, 14 Maret 1947, hlm.1; 14 Maret 1947.

<sup>38</sup> Lihat *Negara Baroe*, 19 Maret 1947, hlm.1; 5 Maret 1947, hlm.2; 8 Februari 1947, hlm.2.

<sup>39</sup> PERNI (Persatuan Nelayan Indonesia) adalah suatu organisasi nelayan yang bertujuan memperbaiki penghidupan nelayan umumnya. Awal tahun 1946 PERNI telah memberi modal kepada nelayan dan beberapa pengusaha ikan kering. Tiga tahun kemudian, PERNI juga telah berhasil mengusahakan berkembangnya empat pelelangan ikan, yaitu di Baroe, Gusung, Mangarabombang dan Barombang.

dan lotto. Tempat seperti ini dianggap tempat menuntut ilmu pengetahuan, sehingga disediakan ruang belajar, serta kursus menjahit untuk pemuda.<sup>40</sup>

Dalam bidang ekonomi berdiri Poesat Pedagang Indonesia (PPI) Makassar, suatu perkumpulan yang meliputi segenap masyarakat dagang di kota ini. Organisasi ekonomi lainnya; Persatoean Nelajan Indonesia (Perni), Gaboengan Pabrik Roti Indonesia (Gapri), Gaboengan Importeurs Indonesia (GII), Roekoen Pelajaran Indonesia (Roepelin). Sedangkan pekerja dalam bidang percetakan membentuk "Sarikat Boeroeh Pertjetakan" dari perusahaan percetakan seperti Pertjetakan Tionghoa, Pertjetakan Celebes, Pertjetakan Volksbelang, Pertjetakan Berita Baroe, dan Pertjetakan Boo Loeng. Sedangkan organisasi Islam sejak tahun 1947 di antaranya Persatoean Islam, Partai Sarikat Islam Indonesia, Persatoean Islam Tionghoa, Persatoean Pegawai Sjarat, Persatoean Poetera Kalimantan, Moeraatoel Ichwan, Sarikat Goeroe Islam, Persatoean Pergoeroean Islam, Moehammadijah, Assiratal Moestakim. Aktif juga Kebangoenan Massenrengpoeloe, P.T.T., Pendorong Kemadjoean Mandar, Parnadi, dan Parindo. Di kalangan masyarakat Tionghoa dilakukan pembentukan Gaboengan Perkoempoelan Pemoeda Tionghoa di Makassar (Hua Chiao Ching Nien Sheh Tuan Lien Hok Hui), pada bulan Juli 1947.<sup>41</sup>

Lembaga pendidikan formal dibuka oleh Kementerian Pengadjaran NIT dan salah satu perhatian utamanya adalah memajukan pendidikan kaum wanita. Selain Sekolah Guru Negara, didirikan Sekolah Goeroe Kepandaian Gadis, dan berbagai kursus untuk meningkatkan keterampilan perempuan. Pada tahun 1947, *Lagere Nijverheidsschool* membuka pelajaran untuk pekerjaan rumah tangga, menjahit dan perawatan anak, sedangkan *Opleidingsschool voor Vakonderwijzeressen* disediakan untuk para guru wanita.<sup>42</sup> Sekolah untuk perempuan lainnya yaitu 'Taman Pendidikan Puteri' dibuka Agustus 1949 yang alumninya diharapkan menjadi pemimpin di masyarakat. Pada sekolah ini selain pengetahuan umum, diajarkan pelajaran kerajinan tangan, pengurusan bayi dan anak, kehalusan budi, serta bahasa. Sekolah ini diprioritaskan untuk mendidik anak-anak bangsawan, karena merekalah yang paling terbelakang tingkat pendidikannya.<sup>43</sup>

Di pihak partikular, kegiatan pendidikan menjadi perhatian 'Balai Pergoeroean Sawerigading' yang berdiri sejak Oktober 1945.<sup>44</sup> Adapun oleh orang-orang Tionghoa, atas inisiatif Consulaat Tiongkok dan berbagai perkumpulan Tionghoa membentuk 'Komite Penjelenggaraan Pembangoenan Gedoeng Sekolah Tionghoa' di Makassar untuk mengatasi kekurangan guru dan ruang sekolah.<sup>45</sup> Sedangkan

<sup>40</sup> *Negara Baroe*, 15 Maret 1947; 20 Februari 1947; 28- Februari 1947, hlm.2.

<sup>41</sup> *Negara Baroe*, 10 Juli 1947, hlm.2; 21 Agustus 1947, hlm.2; 28 Mei 1947, hlm.2; 7 Juli 1947, hlm.2; 14 Agustus 1947, hlm.1.

<sup>42</sup> *Negara Baroe*, 1 Mei 1947, hlm.2; 27 Juni 1947, hlm.2.

<sup>43</sup> Kedudukan perempuan dalam politik mencapai kemajuan signifikan saat ini. Perempuan meraih kedudukan tinggi, seperti Nj. A. Waroh sebagai anggota parlemen, Ch. Salawati Daud dan Nj. Towolioe dalam Dewan *Haminte* Makassar.

<sup>44</sup> *Negara Baroe*, 8 September 1947; 3 September 1947; *Pandji Negara*, No.7, Juli 1949, hlm.120; No.8, Agustus, 1949, hlm.10.

<sup>45</sup> *Negara Baroe*, 1 Agustus 1947, hlm.2; 22 Agustus 1947, hlm.2.

perguruan tinggi untuk pertama kalinya dibuka Fakultas Ekonomi cabang Universitas Indonesia pada tahun 1948.<sup>46</sup>

Perubahan pola pikir dan kesadaran atas hak, menjadi penanda dalam negara baru ini. Persatoean Sekerdja *Haminte* Makassar kerap menuntut perbaikan nasib hingga pemogokan seperti yang terjadi pada Februari 1948. Warga juga menuntut kurangnya pegawai berbangsa Indonesia dalam birokrasi *Haminte*. Orang Indonesia umumnya menjadi pekerja rendahan, sedangkan kedudukan tinggi umumnya masih ditempati orang Belanda. Pemrotes ini menyatakan bahwa orang Indonesia sudah mampu menempati semua posisi, yang telah dibuktikan ketika Jepang berkuasa. Mereka tidak terima dengan syarat administrasi yang seolah dipaksakan seperti kewajiban berbahasa Belanda.<sup>47</sup>

Dalam kehidupan kebudayaan, geliat dan gairahnya tumbuh dalam berbagai bentuk. Benteng Rotterdam menjadi 'dapur' lahirnya lembaga budaya dan seni serta berbagai bentuk kreatifitas. Mula-mula "Jajasan Kebudayaan dan Perpustakaan Umum" yang dipimpin J. E. Tatengkeng menandai pertumbuhan kebudayaan. Pada perpustakaan itu tersedia lebih 30.000 koleksi judul baik berbahasa Indonesia, Belanda, Inggris, Perancis, dan lain-lain. Terdapat juga "Jajasan Dr. Matthes", yang menyimpan naskah lama berbagai kerajaan di Sulawesi Selatan masa lampau.<sup>48</sup> Lembaga budaya lainnya adalah *Kunstkring* Makassar, Panti Pengetahuan, Taman Pembatja dan Gatera. Di kalangan orang Belanda, pada Desember 1948, didirikan *Nederlandse Vereniging voor Oost-Indonesie* (NVOI) yang bekerja mengurus kepentingan orang Belanda dalam arti yang luas.

Simbolisasi sebagai bentuk perhatian pada aspek kebudayaan ditandai ketika Presiden NIT melantik "Panitia Adopsi Pusat". Suatu lembaga yang bekerja untuk mempererat 'hubungan' antara Amsterdan dan Rotterdam pada satu pihak, serta Makassar, Manado, Ambon dan Kupang pada pihak lain. Tugas utamanya adalah mengkoordinir segala kegiatan kebudayaan. Khususnya membentuk lembaga yang menjadi perantara aktivitas kebudayaan. Pada 27 Februari 1948 lembaga itu terbentuk dengan nama "Jajasan Pusat Kebudayaan Indonesia Timur", yang berkedudukan di benteng Rotterdam Makassar.<sup>49</sup>

Salah satu tugas utama "Jajasan Pusat Kebudayaan Indonesia Timur" bersama Kementerian Sosial NIT adalah mendirikan taman baca atau perpustakaan di

---

<sup>46</sup> Pembukaan Fakuliteit Ekonomi secara resmi pada 8 Oktober 1948. Namun usahanya telah dimulai ketika Drs L.A. Einthoven ditunjuk untuk mempersiapkan pembukaan tersebut dan telah tiba di Makassar sejak bulan Oktober 1947. Pada tanggal 15 Januari 1948, perkuliahan dimulai dengan mahasiswa 16 orang, terdiri dari 8 Indonesia, 6 Tiongoa, dan 2 Belanda. Pada 1 Februari 1948, Prof. Dr. Joh. J. Hanrath ditunjuk sebagai Mahaguru sekaligus menjadi ketua fakuliteit. Pada 30 April 1948, telah didirikan Perkumpulan Mahasiswa dan Persatuan Mahasiswa Indonesia. Selain itu dibentuk pula Perkumpulan Mahasiswa Kristen. Pada 1948 ini juga dibentuk cabang *International Student Service*. Pada 1 Oktober 1949 jumlah mahasiswanya 77 orang. Lihat *Pandji Negara*, No. 15, Oktober 1949, hlm. 4-5.

<sup>47</sup> *Indonesia Timoer*, 18 Februari 1948, hlm.2.

<sup>48</sup> *Nusantara*, 24 Mei 1951, hlm.3, kolom. 2-3.

<sup>49</sup> *Pandji Negara*, No. 1, April 1949.



berbagai tempat. Puncaknya adalah pendirian 'Taman Batjaan dan Perpustakaan Makassar' dan kantor 'Pusat Perpustakaan Indonesia Timur' pada 1949. Perpustakaan pusat ini akan mempunyai cabang di seluruh daerah dan mengaktifkan taman bacaan.<sup>50</sup> Di pihak lain, perpustakaan partikelir juga tumbuh seperti Perpustakaan 'Setia' di *Pattunuangweg*. Pada bulan Maret 1947 dibuka perpustakaan *Burger Welfare*, terletak di belakang gedung pertemuan *Arbeid Adelt* di Hoogepad. Perpustakaan ini menyediakan sekitar 4.000 roman berbahasa Belanda, dan buku jenis lainnya.<sup>51</sup> Pemerintah NIT beranggapan bahwa kemajuan masyarakat hanya dapat dicapai jika orang dapat membaca dan menulis, dan akhirnya mendorong keinginan untuk mengetahui segala apa yang ada di dunia ini.<sup>52</sup>

Media massa tercetak merupakan corong utama ide dan aktivitas budaya, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun pihak partikular. Pada tahun 1947-1949, terbit majalah *Tjerman Doenia*, yang bertujuan memberi gambaran tentang kemajuan dunia. Pembaca diajak mengetahui bahwa dunia tidak tinggal diam, politik, perekonomian dan kebudayaan juga tidak. Kemajuan adalah sesuatu yang mutlak diraih negara baru ini dan terlibat dalam perkembangan di belahan dunia lain.<sup>53</sup> Kementerian Penerangan NIT sendiri sejak Agustus 1946 sampai Desember 1948 menerbitkan *Majalah Budaja*, yang disebut sebagai 'pendorong' semangat kebudayaan baru.

Kehidupan kebudayaan yang melingkupi aktivitas masyarakat perkotaan melahirkan suasana kosmopolitan di mana keberagaman menjadi sesuatu yang lekat dengan penduduk. Diskriminasi yang tegas masa kolonial Belanda mulai kabur dan perbauran dalam perbedaan semakin meluas, baik dalam hal etnis maupun agama. Hal ini bisa dilihat dalam seni, pendidikan, olahraga, pergaulan sosial dan tradisi masyarakat. Contoh paling sederhana adalah tradisi pengantin orang Tionghoa yang memakai pakaian tradisional Bugis-Makassar. Begitupun dalam ritual kelahiran pada masyarakat Tionghoa juga menyertakan tradisi lokal. Komunitas orang Tionghoa muslim di Indonesia Timur cukup besar, bahkan di beberapa tempat mempunyai masjid sendiri. Komunitas India melalui "Liga India" juga aktif membuat kegiatan. Sarana yang 'menyatukan' perbedaan etnis penduduk kota, salah satunya melalui kegiatan olahraga. Mereka berbaur tidak saja dalam permainan atau pertandingan olahraga, namun juga bergabung dalam kepengurusan organisasi olahraga, seperti di perkumpulan sepakbola, bola keranjang, atletik, sepak raga, dan lain-lain.<sup>54</sup>

---

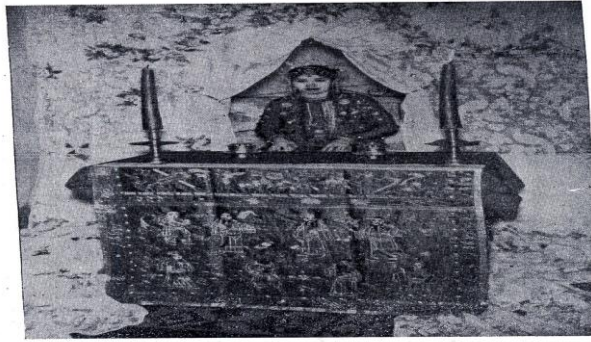
<sup>50</sup> Pada saat pembukaan kantor tersebut, diselenggarakan pameran lukisan. Lukisan yang ditampilkan di antaranya lukisan pelukis Bali, lukisan Henk Ngantung, dan berbagai lukisan maupun ukiran dari berbagai daerah. Lihat *Pandji Negara*, No. 14, Oktober 1949, hlm.17.

<sup>51</sup> *Negara Baroe*, 18 Maret 1947, hlm.2.

<sup>52</sup> *Pandji Negara*, No. 19, November 1949.

<sup>53</sup> Orang dari luar wilayah Makassar menjadi sebagian besar anggota redaksi majalah ini, di antaranya R. Dajoh, C. Kairoepan, R. Ngabei Margono Noetokoesoema, R. Noerwoto.

<sup>54</sup> *Negara Baroe*, 8 Februari 1947, hlm.2; *Pandji Negara*, No. 28, Februari 1949, hlm.10-11.



*Pengantin bangsa Tionghoa berpakaian adat Bugis Makassar.*

**Gambar 4.** Pengantin orang Tionghoa berpakaian adat Bugis Makassar  
*Sumber: Negara Baroe, 8 Februari 1947, hlm.2*

Di tengah banyak keterbatasan yang dihadapi negara baru ini, geliat kebudayaan adalah aspek yang paling menggembirakan sekaligus jembatan beragam perbedaan. Hal ini terlihat dalam gubahan syair, karangan, lukisan, lagu, kegiatan berorganisasi, atau pembentukan berbagai perkumpulan. Lembaga seperti “Gabungan Keboedajaan Indonesia” sejak tahun 1947 memobilisasi kegiatan pertunjukan. Perkumpulan ini memang sejak awal mencita-citakan bangkitnya seni untuk mendukung pembangunan negara. Budaya populer dan massal juga berkembang, seperti menonton di bioskop, pertandingan sepakbola, sandiwara<sup>55</sup>, hingga ‘pasar malam’.<sup>56</sup>

Pertandingan olahraga dan pasar malam berlangsung di lapangan *Haminte* (Koningsplein).<sup>57</sup> Pertunjukan seni dan budaya umumnya berlangsung di *Societeit de Harmonie* atau gedung perkumpulan. Gedung pertemuan terkenal di antaranya; ‘Taman Persaudaraan’ di *Zeestraat* dan gedung ‘Loge’ di *Hoogepad*.<sup>58</sup> Sedangkan pemutaran film di bioskop, sejak tahun 1947 berlangsung di Sirene Theater, Harmonie Theater, Indonesia Theater, Empress Theater. Menjelang tahun 1950, ada bioskop Taman Gembira, Al-Hambra, City Theater.<sup>59</sup> Sebagian bioskop tersebut dikelola orang Tionghoa, namun pengusaha lokal seperti Hadji Lala terlibat di bidang ini dengan mendirikan ‘The Indonesian Cinema Corporation Ltd.’

<sup>55</sup> Beberapa pertunjukan sandiwara yang menarik perhatian adalah ‘Menuju Gelanggang’, pertunjukan sandiwara Rahajoe S.S.weg dengan cerita ‘Bandjir Darah di Soengai Sadang’, atau pertunjukan sandiwara di gedung L. B. S di Schijfberweg yang kerap menampilkan ‘Teboesan Dosa’ atau ‘Sabda Sang Dewa’. Lihat *Negara Baroe*, 30 Agustus 1947, hlm.2; 11 Juli 1947, hlm.2.

<sup>56</sup> *Pandji Negara*, No.5, Juni 1949; *Negara Baroe*, 5 Juli 1947, hlm. 2.

<sup>57</sup> Pada pasar malam bulan Agustus 1948 tidak saja menggabungkan simbol Belanda dan Indonesia. Namun juga menyatukan para elit seperti Presiden, menteri, pembesar sipil, militer dan marine, para raja, anggota parlemen, Dewan Selebes Selatan dan *Haminte* kota Makassar. Pada pertemuan seni dan budaya dipertontokan beragam seni budaya, seperti seni budaya Tionghoa, dansa khas Barat, sandiwara, serta seni budaya dari berbagai suku di Indonesia. Lihat *Indonesia Timoer*, 1 September 1948, hlm.1.

<sup>58</sup> *Negara Baroe*, 15 Februari 1947, hlm.2; 1 Agustus 1947, hlm.2.

<sup>59</sup> *Negara Baroe*, Mei 1947; 15 April 1947; 29 Agustus 1947.

Bersemainya kebudayaan tergambar dalam potongan sajak J. E. Tatengkeng, dan disebut sebagai 'gerakan sukma' oleh penulis Salman A. S. berikut ini.<sup>60</sup>

Jang berpantjaran dalam mata  
Terus menjelma  
Ke – indah – kata  
(Sadjak J.E. Tatengkeng)

Curahan kalbu sasterawan muda di Indonesia Timur oentoek memberikan djalan kepada djiwa muda jang terus bergerak dalam segala hal.

*Gelanggang Kesusasteraan* tempat mereka bercengkerama, mencari dasar oentoek melangkah terus ke arah peninggian derajat kesusasteraan Indonesia seluruhnja.

Untuk kemadjuan tehnik, ekonomi, politik dan kebudajaan di tanah air''

(Esai Salman A.S.)

## KESIMPULAN

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 direspons secara beragam di berbagai wilayah Indonesia. Ketika semangat republikan meluas di beberapa tempat, di tempat lain justru terjadi penolakan atau perlawanan. Di wilayah timur Indonesia, justru terjadi kolaborasi antara orang Belanda dan aristokrat lokal untuk membentuk negara tersendiri. Kesepakatan tersebut berwujud dengan lahirnya NIT yang dideklarasikan pada tahun 1946. Keberadaan negara ini yang memberi pengaruh besar atas dinamika sosial politik di wilayah timur Indonesia, hingga tahun 1950 atau dalam periode yang sering disebut sebagai masa revolusi.

Kota Makassar mengambil peran penting dalam konteks ini karena ditetapkan menjadi ibukota NIT. Dengan status tersebut, maka usaha penataan kota dan penyiapan infrastruktur mutlak dilakukan. Tuntutan itu tidak mudah diwujudkan karena banyaknya keterbatasan yang dimiliki pemerintah kota. Beberapa infrastruktur utama mampu dibangun atau diperbaiki, seperti gedung perkantoran, pelabuhan, dan jalan utama. Namun kebutuhan prasarana untuk penduduk kota pada umumnya belum dapat disediakan. Seperti kebutuhan perumahan, perbaikan kampung, hingga ketersediaan pasar yang layak. Meskipun demikian, karena peran politiknya, Makassar tetap meneguhkan posisi sebagai kota utama (*hub*) di kawasan timur Indonesia.

Posisi tersebut mendorong terjadinya transformasi masyarakat perkotaan dalam berbagai aspek. Kota ini kembali memperlihatkan citra kosmopolitannya seperti pernah terlihat pada masa kejayaan Kerajaan Makassar jauh sebelumnya. Personil pemerintahan hingga penduduk kota terdiri dari beragam etnis, berasal dari berbagai daerah, dan agama yang berbeda. Semuanya menyatu menciptakan masyarakat yang berubah dan saling memberi. Aktivitas kebudayaan adalah konsekuensi dan pilihan atas terciptanya suatu kondisi kemajemukan tersebut. Kompromi tercipta dalam mengakomodasi segala bentuk kepentingan dan kondisi

---

<sup>60</sup> *Pandji Negara*, No. 2, Mei 1949.

masyarakat. Secara politik, eksistensi Belanda, semangat federalisme, maupun dukungan pada republik harus diterima antara satu dan yang lain. Hal ini tergambarkan pada perayaan kenegaraan saat simbol Belanda maupun Indonesia ditampilkan bersama. Sedangkan ekspresi “kemerdekaan” terefleksi dalam kehidupan masyarakat perkotaan. Aktivitas kebudayaan berkembang secara semarak. Pemerintah NIT melalui Kementerian Kebudayaan mengambil inisiatif untuk menghidupkan dan menggerakkan berbagai aktivitas budaya. Tergambarkan adanya semangat untuk menempatkan kebudayaan sebagai salah satu fondasi dan kekuatan NIT. Hal ini mutlak dilakukan untuk memberi ruang dan mengakomodasi pilar-pilar atau dasar negara ini yang terbentuk oleh keberagaman etnis maupun agama. Suasana ini direspons oleh penduduk kota dengan antusiasme untuk terlibat dalam berbagai kegiatan kebudayaan. Kelompok seni, budaya maupun yang berlatar belakang etnis dan agama leluasa melakukan kegiatannya. Hal tersebut mendorong terciptanya pembauran dan pergaulan lintas budaya dan agama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Surat Kabar :

*Nusantara*, 24 Mei 1951, hlm.3, kolom. 2-3.

*Negara Baroe*, 6 Februari 1947, hlm.2; 7 Februari 1947, hlm.2; 8 Februari 1947, hlm. 2; 15 Februari 1947, hlm.2; 20 Februari 1947; 28- Februari 1947, hlm.2.

*Negara Baroe*, 5 Maret 1947; 14 Maret 1947, hlm.1; 15 Maret 1947; 18 Maret 1947, hlm.2; 19 Maret 1947, hlm.1; 21 Maret 1947, hlm.1; 31 Maret 1947, hlm.1.

*Negara Baroe*, 12 April 1947; 15 April 1947; 16 April 1947, hlm.2.

*Negara Baroe*, 1 Mei 1947, hlm.2; 28 Mei 1947, hlm.2;

*Negara Baroe*,; 27 Juni 1947, hlm.2.

*Negara Baroe*, 5 Juli 1947, hlm. 2; 10 Juli 1947, hlm.2; 7 Juli 1947, hlm.2; 11 Juli 1947, hlm.2; 14 Juli 1947, hlm.2; 19 Juli 1947, hlm.2.

*Negara Baroe*, 1 Agustus 1947, hlm.2; 7 Agustus 1947, hlm.2; 9 Agustus 1947, hlm.2; 14 Agustus 1947, hlm.1; 21 Agustus 1947, hlm.2; 22 Agustus 1947, hlm.2; 30 Agustus 1947, hlm.2.

*Negara Baroe*, 3 September 1947; 8 September 1947.

*Negara Baroe*, 7 Oktober 1947, hlm. 2; 15 Oktober 1947, hlm.2; 30 Oktober 1947.

*Indonesia Timoer*, 12 Februari 1948, hlm.1; 13 Februari 1948, hlm.2; 18 Februari 1948, hlm.2.

*Indonesia Timoer*, 5 Maret 1948, hlm.1-2;

*Indonesia Timoer*, 10 Mei 1948, hlm.2; 29 Mei 1948, hlm.3;

*Indonesia Timoer*, 13 Mei 1948, hlm.1; 24 November 1948, hlm.2.

*Indonesia Timoer*, 24 Agustus 1948, hlm.4.

*Indonesia Timoer*, 1 September 1948, hlm.1; 18 September 1948, hlm.4; 22 September 1948, hlm.2; 23 September 1948, hlm.3; 25 September 1948, hlm.2.

*Indonesia Timoer*, 9 Oktober 1948, hlm.2; 16 Oktober 1948, hlm.3.

*Indonesia Timoer*, 1 November 1948, hlm.1; 13 November 1948, hlm.4.

*Indonesia Timoer*, 2 Desember 1948, hlm.3; 8 Desember 1948, hlm.2.

### **Majalah :**

*Majalah Budaja*, 1946 – 1948

*Tjermine Doenia*, 1947 - 1949

*Locale Techniek*, 1940, No.1.

*Pandji Negara*, No. 28, Februari 1949

*Pandji Negara*, No. 1, April 1949.

*Pandji Negara*, No. 2, Mei 1949.

*Pandji Negara*, No.5, Juni 1949.

*Pandji Negara*, No.6, Juli 1949; No.7, Juli 1949

*Pandji Negara*, No.8, Agustus 1949; No.9, Agustus 1949.

*Pandji Negara*, No. 14, Oktober 1949; No. 15, Oktober 1949.

*Pandji Negara*, No. 19, November 1949.

*Pandji Negara*, No.21, Desember 1949.

### **Arsip, Buku, Dokumen :**

Agung, Ide Anak Agung Gde, *Dari Negara Indonesia Timur ke Rrepublik Indonesia Serikat* (Yogyakarta: Gadjah Mada university Press, 1985).

Bachtiar, Harsja W. *The Indonesian Nation: Some Problem of Integration and Disintegration* . Singapore: ISEAS, 1974.

Benedict, Anderson. *Imagined Communities. Reflection on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso, 1983.

*Besluit* Let. Gubernoer Djenderal 14 Maret 1947, No.5

*Besluit* Wakil Direktur Binnenland Bestuur 14 Maret 1947, No.43-47.

Chaniago, J. R., "Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia: Peranan Pemimpin Lokal dalam Dinamika Politik di Sulawesi Selatan dan Sumatera Timur 1950" (Disertasi Universitas Gadjah Mada, 2002).

Djunedding, Burhaman, "Pesta Demokrasi di Daerah Bergolak: Pemilu Tingkat Lokal dan Pemilihan Umum 1955 di Sulawesi Selatan". (Yogyakarta: *Tesis Jurusan Sejarah FIB-UGM*, 2010).

- Gonggong, Anhar. *Abdul Qahhar Mudzakkar. Dari Patriot hingga Pemberontak*. Jakarta: Grasindo, 1992.
- Harvey, Barbara S., *Pemberontakan Kahar Muzakkar. Dari Tradisi ke DI/TII*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989).
- Herbert, Feith. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. New York: Cornell University, 1962.
- Kahin, George Mct. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. New York: Cornell University, 1952.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru Baru: Sejarah Pergerakan Nasional. Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Jakarta: Gramedia, 1993.
- Koerts, H. J., "Amtenar BB di Sulawesi Selatan", dalam S.L. Van der Wal (peny.) *Kenang-Kenangan Pangrehpraja Belanda 1920-1942* (Jakarta: Djambatan, 2001).
- Propinsi Sulawesi*. Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953.
- Staatsblad* 1947, No. 9, 10.